

**Pergerakan Sakralitas-Nasionalisme Papua:
Pola Pergerakan Aliansi Mahasiswa Papua dalam Ruang Solidaritas di Yogyakarta**
**(The Movement of Sacred Nationalism of Papua:
The Solidarity Space Patterns of Papuan Student Alliance Movement in Yogyakarta)**

Fred Keith Hutubessy

Magister Sosiologi Agama, Universitas Kristen Satya Wacana
Jalan Diponegoro No. 52-60, Salatiga 50711
Tel.: +62 (813) 90545776
Surel: fredkeith12@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan menemukan pokok pergerakan Aliansi Mahasiswa Papua dan Nasionalisme pergerakannya yang semakin masif di Yogyakarta. Penelitian ini dimotivasi oleh penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa Aliansi Mahasiswa Papua mengalami keterpecahan secara struktur organisasi, dan menyemainya Nasionalisme Papua kepada Aliansi Mahasiswa Papua saat mereka bergabung dalam komunitas ini. Artikel dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan sumber pustaka. Artikel ini kemudian menemukan bahwa telah tersemainya Sakralitas-Nasionalisme Papua dalam organisasi Aliansi Mahasiswa Papua. Fakta-fakta sejarah menunjukkan bahwa Nasionalisme ini memiliki kesakralan dan secara eksis dihidupkan melalui doktrinasi oral dalam keluarga, sehingga telah menegaskan perasaan berbeda dengan Indonesia oleh Aliansi Mahasiswa Papua. Semakin kuatnya perasaan berbeda disebabkan oleh pengalaman partisipatif yang berhubungan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan tertutupnya ruang demokrasi akibat peran kapitalisme, imperialisme dan militerisme yang dalam pemetaannya merupakan musuh yang sengaja dibentuk melalui sistem oleh penguasa dan mendominasi kehidupan orang Papua. Hal ini mengakibatkan pergerakan mereka semakin masif dan bukti dari kegagalan Indonesia dalam membentuk Nasionalismenya kepada Papua. Karena ternyata, Sakralitas-Nasionalisme cukup kuat dalam diri mereka. Artikel ini juga menunjukkan bahwa perlu ditinjau lebih mendalam melalui aspek hukum dan resolusi konflik.

Kata kunci: Aliansi Mahasiswa Papua, gerakan sosial, hak asasi manusia, ruang solidaritas, sakralitas-nasionalisme

Abstract

This article aims to discover the principal movements of the Papuan Student Alliance and its increasingly massive nationalism in Yogyakarta. This research was motivated by previous research which found that the Alliance of Papuan Students experienced organizational structure disintegration, and seeded Papua Nationalism to the Papuan Student Alliance when they joined this community. The articles in this study use the method of observation, interviews, and library resources. This article later found out that the Papuan Sacred Nationalism had been established in the Papuan Student Alliance organization. The historical facts show that this Nationalism has sacredness and is naturally revived through oral doctrine in the family so that it has affirmed a different feeling with Indonesia by the Papuan Student Alliance. The increasing feeling of difference is caused by participatory experiences related to violations of human rights, and the closure of democratic space due to the role of capitalism, imperialism, and militarism which in its mapping are enemies that are deliberately formed through the system by the authorities and dominate the lives of Papuans. This resulted in their movement becoming more massive and evidence of Indonesia's failure to form its Nationalism to Papua. Because it turns out, Sacred-Nationalism is quite

strong in them. This article also shows that it needs to be reviewed more deeply through the legal aspects and conflict resolution.

Keywords: human rights, papuan student alliance, social movement, solidarity space, the sacred of nationalism

PENDAHULUAN

Studi dalam tulisan ini mengeksplanasi tentang pola pergerakan Sakralitas-Nasionalisme Aliansi mahasiswa Papua dalam ruang solidaritas bersama di Yogyakarta. Sebuah pergerakan yang memiliki kekuatan mobilisasi dalam bentuk aksi massa di Indonesia tentunya memiliki tujuan. Demikian pula dengan pergerakan mahasiswa Papua di kota-kota studi yang tampaknya semakin massif. Beberapa laporan media cetak memberitakan bahwa aksi mahasiswa Papua yang secara fundamental menyuarakan tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia dan meminta untuk melakukan referendum sebagai bentuk sikap politik untuk memisahkan diri dari Indonesia. Pada kenyataannya, pola penanganan pada aksi tersebut selalu ditanggapi dengan tindakan represif oleh aparat keamanan dengan alasan merupakan bentuk upaya melawan negara.

Gerakan aksi massa oleh Aliansi Mahasiswa Papua di Yogyakarta merupakan salah satu dari sekian banyak fakta penting yang menampilkan bahwa sejak bergabung dengan Indonesia melalui Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) di Tahun 1969, telah terjadi permasalahan yang krusial dan bukan sekedar masalah klasik dan bahkan sudah lazim terjadi dengan Indonesia (Widjojo 2009). Dari penjelasan di atas, masalah krusial yang tak pernah selesai telah berkaitan dengan nasionalisme dalam diri orang Papua yang oleh Materay (2012) ditemukan bahwa terdapat nasionalisme ganda dalam diri orang Papua. Nasionalisme dalam diri orang Papua dalam perkembangannya oleh Hutubessy (2016) menemukan bahwa perasaan berbeda dengan Indonesia disebabkan oleh Sakralitas-Nasionalisme yang telah tersemat dalam diri mereka yang disebabkan oleh penghayatan mendalam terhadap kesakralan mitologi, yang diimplementasikan dalam manifesto politik sebagai sebuah negara merdeka secara *de facto* dan *memoria passionis* terkait kekerasan yang telah terjadi dalam diri mereka.

Oleh karenanya, artikel ini berupaya untuk menemukan mengapa aksi Aliansi Mahasiswa Papua semakin massif di Yogyakarta. Sejauh yang diketahui dan tanpa memungkirkan penelitian-penelitian sebelumnya, telah ada tulisan-tulisan terkait aspek Nasionalisme Papua dan pergerakan Aliansi Mahasiswa Papua oleh Djopari (1993), Osborne (2001), Corputty (2007), Singh (2008), Materay (2012), Suraywan (2013), Hutubessy (2016), dan Pamuji (2018). Namun, belum ditemukan pembahasan yang lebih mendalam terkait aspek pergerakan Nasionalisme Aliansi Mahasiswa Papua.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengembangkan sikap, perilaku, dan pengalaman dalam menemukan data (Creswell 2010). Cara-cara yang digunakan seperti observasi, wawancara secara individu, serta ditunjang juga oleh beberapa literatur berupa buku-buku dan jurnal-jurnal untuk menemukan sejarah Papua dan perkembangannya serta laporan dari berbagai media tentang gerakan ini. Sumber wawancara telah diperoleh dari sejumlah mahasiswa Papua yang melakukan aksi di kota Yogyakarta. Beberapa di antaranya merupakan bagian dari kelompok Aliansi Mahasiswa Papua. Dalam melakukan analisis, artikel ini menggunakan konsep Sakralitas-Nasionalisme, Hak Asasi manusia, dan Kapitalisme untuk menelisik lebih mendalam tentang sejarah dan fakta konflik untuk menemukan korelasinya dengan gerakan Aliansi Mahasiswa Papua di Yogyakarta.

Khusus untuk sakralitas-nasionalisme, konsep ini digunakan untuk menemukan apakah aksi massa yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Papua memiliki korelasi dengan temuan penelitian dalam konsep Sakralitas-Nasionalisme (Hutubessy 2016). Oleh karenanya, ketiga fase dalam konsep ini yakni fase hibriditas, fase transisi dan fase pergerakan akan di gunakan pula untuk mengkaji dalam korelasinya dengan aksi massa yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Papua di Yogyakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pokok Pergerakan Mahasiswa Papua: Sebuah Perjuangan Hak Asasi Manusia

Suatu pergerakan yang melibatkan aksi massa mengisyaratkan sebuah kepentingan hegemoni individu maupun kelompok. Akumulasi kepentingan yang tidak terpenuhi menyebabkan protes dilakukan sebagai bentuk perlawanan. Aksi protes menurut Tilly (1986), digunakan oleh para aktivis pergerakan sebagai bagian dari tuntutan. Namun bagi (Hiariej 2010:135), protes merupakan bentuk yang tidak lazim terjadi sehingga keabsahannya dapat dipertanyakan karena berimplikasi kepada eksistensi hubungan kekuasaan dalam kelembagaan. Pada perkembangannya, aksi gerakan sosial dianggap sebagai upaya untuk menghambat struktur kebijakan negara. Namun dipihak lain, gerakan sosial yang dilakukan oleh massa mengisyaratkan transformasi dan perubahan struktural yang berbasis kepada kepentingan kolektif yang belum dilakukan oleh negara. Pada hakekatnya protes yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Papua bertujuan untuk mencapai keadilan yang dalam konteks Papua berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Aristoteles sebelumnya telah memberikan konsep bernegara atas dasar hukum. Baginya, negara seharusnya menjamin kehidupan bernegara untuk mencapai keadilan atas nama hukum, termasuk Hak Asasi Manusia bagi setiap warganya. Pemikir barat salah satunya John Locke telah menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan sebuah konsep pemberian yang secara alami. Menurutnya, *God is the author of the natural law*. Ia mengakui bahwa keberadaan Tuhan menjadikan hak ini perlu diakui secara moral dan semuanya berasal dari Tuhan. Baginya, negara harus memiliki peranan penting dalam melindungi kepentingan manusia sebagai warga negara (Locke 1959:69-70). Berbeda dengan Locke, posisi Hak Asasi Manusia menurut Hannah Arendt bersifat paradoks dan tidak berarti apa-apa tanpa adanya komunitas yang mewadahi (Arendt 1962).

Bagi Arendt, manusia pada hakekatnya memiliki hak asasi, namun dalam kenyataannya mereka tidak memiliki hak dalam mendapatkan haknya. Oleh karenanya, dibutuhkan sebuah lembaga yakni Negara untuk menjadi hak tersebut. Pemikiran Arendt dipengaruhi oleh posisinya sebagai penganut Republikanisme yang cenderung memandang struktur komunitas memengaruhi pola eksistensi di ruang publik. Ia cenderung mengkritisi pemikir dahulu seperti John Locke, Thomas Hobbes dan Immanuel Kant (Hardiman 2011:26-29) dengan mendasarkan kepada ide abstrak yang dikembangkan mereka dalam ruang liberal. menurutnya, kebebasan hak asasi hanya bersifat individu-individu yang berjuang tanpa wadah alasan adi kodrati. Sementara itu, kebangkitan liberalisme yang diawali oleh individu-individu yang sadar kebebasan dan mencoba melawan tirani kekuasaan pada konteks abad ke 17 hanya bersifat pra politis. Baginya, tanpa negara, tidak ada hak yang bisa dilindungi.

Konteks Indonesia dimungkinkan berkorelasi dalam ide besar Arendt yang menjunjung tinggi hukum sebagai cita-cita bersama untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyatnya termasuk Hak Asasi Manusia. Secara legal, Indonesia sebagai negara turut serta menjamin kehidupan Hak Asasi Manusia. Di awal reformasi, pemerintah melegalkan peraturan perundang-undangan No. 39 tahun 2009 dan No 29 tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia dan pengadilannya. Tujuannya, untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM yang selama ini terjadi di Indonesia di masa Orde Baru (Winandi 2009). Meskipun demikian, apa yang telah diupayakan melalui undang-undang ini belum secara signifikan menjamin hak asasi warganya khususnya dalam konteks Papua (Sitepu 2017). Pada akhirnya, negara kemudian dianggap belum mampu untuk melindungi hak asasi warganya. Aksi gerakan massa Aliansi Mahasiswa Papua dalam bentuk protes disebabkan oleh permasalahan di masa lalu yang meliputi; Nasionalisme yang berbeda, pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua, serta pemerataan pembangunan sosial pascaintegrasi ke Indonesia (Droglever 2010; Osborne 2001; Meteray 2012; Hutubessy 2018). Aspek-aspek ini berkorelasi antara satu dengan lainnya dan menjadi tema besar dalam pokok perjuangan dan semakin masif berkembang. Fakta sejarah menurut Wonda (2007), menemukan bahwa integrasi Papua ke Indonesia adalah awal kekerasan terhadap rakyat Papua. Integrasi Papua melalui proses perjanjian *New York* yang diimplementasikan dalam Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) di tahun 1969 telah menghasilkan represifitas dan sarat akan kepentingan (Osborne 2001; Droglever 2010).

Pada Tabel 1 akan ditemukan sejumlah gerakan perlawanan secara presentatif pasca bergabung dengan Indonesia. Mereka mengibarkan bendera Bintang Kejora sebagai bentuk perlawanan dan presentasi identitas dan perasaan berbeda dengan Indonesia.

Tabel 1. Daftar Aksi Gerakan Massa di Papua 1971-1999

Proklamasi kemerdekaan Papua dan aksi protes terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) menjelang Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA)	Seth Rumkorem, Prai, Mauray, Tablanelina Jerisetou, Louis Wajoi	Jacob Waris, Jacob Dorinus Philemon Jufuway,		1971
Aksi pengibaran bendera dan rencana penyerbuan kantor Gubernur	Persila Barbalina Merry Vonny Renny dan Fisirewa-Yakadewa	Yakadewa, Ikari, Yaron, Yakadewa, Yakadewa, Dominggas	Kantor Gubernur	1980
Penyerangan dan percobaan pembebasan tahanan KOPKAMTIB	Tidak diketahui		Penjara Abepura	1981
Mengibarkan bendera bintang kejora dan membacakan teks proklamasi Papua Barat	9 mahasiswa Universitas Cenderawasih		Abepura	1982
Pengibaran bendera bintang kejora	Elias Angitta XVII Cenderawasih	Warsey, Kodam	Kantor DPRD Tingkat 1	1984
Proklamasi OPM dan pengibaran bendera bintang kejora	Thomas dan 60 simpatisan	Wanggai orang	Jayapura	1988
Pengibaran bendera bintang kejora dan tuntutan pemisahan diri dari NKRI. Kejadian ini dikenal dengan Tragedi "Biak Berdarah"	Filep Karma dan simpatisan		Biak	1998
Bendera Bintang Kejora dikibarkan berdampingan dengan bendera Merah Putih oleh masyarakat Nimboran	Yance dan Hembring Hembring dan simpatisan	Hembring dan Mesakh	Nimboran	1999
Pengibaran Bendera Bintang Kejora	Yoas Kambuaya, Yakomina, Yance Wabdaron	Yafle, Hans Isir,	Sorong	1999
Pengibaran Bendera Bintang Kejora	Yosepha dan Pdt. Isaac	Alomang Isaac	Timika	1999

	Onawame (tidak terlibat, namun menyatakan bertanggung jawab atas aksi tersebut)
Pengibaran bendera bintang kejora serentak di seluruh Tanah Papua dan tuntutan salah satunya ingin melepaskan diri dari Indonesia.	Theys Hiyo Eluay Jayapura 1999 dan simpatisan

Aliansi Mahasiswa Papua merupakan organisasi yang dibentuk oleh mahasiswa Papua yang berkuliah di Yogyakarta dan kemudian secara sah didirikan 30 Mei 1998 di Jakarta. Aliansi Mahasiswa Papua berorientasi dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua (Pamuji 2018). Pokok pergerakan Aliansi Mahasiswa Papua di sejumlah kota studi khususnya di Yogyakarta berkorelasi dengan aksi massa di awal integrasi. Kesamaannya tampak dalam aksi protes yang dilakukan secara taktis dan masif dengan menggunakan atribut bendera Bintang Kejora. Menurut Douw (2018), aksi yang mereka lakukan sebagai bentuk kesadaran tentang permasalahan krusial yang telah terjadi di Papua pascabergabung dengan Indonesia. Tema kemanusiaan menjadi pokok perjuangan yang di dalamnya terdapat entitas Hak Asasi Manusia yang selama ini terabaikan. Selanjutnya, mereka menawarkan referendum sebagai solusi demokrasi untuk memisahkan diri dari Indonesia.

Sebelum melakukan aksi, mereka terlebih dahulu melakukan pemetaan musuh bersama. Douw (2018) mengatakan,

Kalau secara umum terutama soal aksi masa itu sendiri, boleh di bilang mulai tahun 1998 gerakan massa mulai bangkit di Indonesia, kawan-kawan mulai membentuk gerakan mahasiswa. Di sana metode perjuangan yang teman-teman dorong itu terutama aksi massa. Aksi-aksi dengan kekuatan mobilisasi massa. Awal yang mendorong itu terutama kesadaran kawan-kawan untuk memetakan siapa musuh sebenarnya. Misalnya AMP telah petakan soal imperialisme, awal munculnya imperialisme, sampai mendorong kolonialisme dan juga militerisme yang telah bertahun-tahun telah menghisap rakyat Papua dan alam Papua.

melibatkan pemilik sumber daya alam. Aspek ekonomi merupakan salah satu penyebabnya, namun tidak dapat diingkari bahwa permasalahan Papua juga berkaitan pula dengan aspek politik yang dalam pandangan kapitalisme Marx mengingkarinya.

Terkait aspek kapitalisme (Senis 2013:44) dalam penelitiannya menegaskan bahwa kontrak karya Freeport merupakan tolok awal kapitalisme ekonomi di Papua. Implikasinya mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam berupa kekayaan tambang, hutan, laut telah dikelola sedemikian rupa dan dikuasai oleh pemilik modal dan elit politik untung mendapatkan keuntungan, yang juga menurut (Benny Giay dan Yafet Kambai 2003:41) bahwa negara turut berperan dalam eksistensi perusahaan *Freeport* di Indonesia dan berdampak kepada pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua. Menurut Douw (2018), permasalahan yang dihadapi oleh orang Papua melawan sistem yang menghisap yang disebabkan oleh kapitalisme, dan bukan merupakan permasalahan dominasi suku migran yang mendominasi Papua. Kesadaran ini kemudian menurutnya telah memberikan ruang untuk mereka berafiliasi dengan gerakan-gerakan pro-demokrasi yang mendukung ruang demokrasi dalam isu bersama terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia.

musuh sebenarnya ini adalah bukan persoalan karena dia ras melayu, atau suku jawa, atau suku Makassar, suku sumatera dan sebagainya, tapi sebenarnya musuh rakyat itu ialah sistem yang menghisap itu. Makanya kawan-kawan mencoba untuk melawan sekaligus merangkul massa yang lebih luas itu dan menyadarkan sebenarnya musuh sebenarnya yang harus dilawan siapa. Kawan-kawan mulai membuka

ruang yang lebih luas dalam pro-demokrasi, misalnya kawan-kawan di kulonprogo, terus di cemara sewu, misalnya kawan-kawan yang di Jogja sini toh.

Prodemokrasi pada hakekatnya bukan merupakan sebuah gerakan melainkan sebuah ruang. Pro-demokrasi merupakan istilah yang diberikan kepada individu dan organisasi paten maupun taktis yang memiliki kesadaran demokrasi untuk berjuang di ruang publik. Aliansi Mahasiswa Papua di Yogyakarta merupakan bagian dari pro-demokrasi terkait isu-isu HAM dan Demokrasi yang sering diperjuangkan, Mofu (2019) mengatakan, “dalam beberapa kesempatan, teman-teman dari pro demokrasi seringkali membuka ruang dengan mengajak untuk melakukan aksi bersama. Sa (saya) kira ini respon yang cukup baik.”

Terdapat dua catatan penting dari bergabungnya Aliansi Mahasiswa Papua di Yogyakarta dan beberapa organisasi lainnya di bawah payung label prodemokrasi. *Pertama*, Hak Asasi Manusia Papua dalam ruang ini sedang diperjuangkan secara komunal untuk masyarakat Papua dan masyarakat Indonesia lainnya yang haknya telah dirampas. *Kedua*, nilai perjuangan Aliansi Mahasiswa Papua di Yogyakarta membuka peluang untuk memperkuat basis massa melalui isu bersama dengan organisasi massa lainnya. Roy Karoba (dalam Kusumadewi 2016):

masyarakat Yogya sama seperti kami di Papua, banyak yang tertindas. Pemerintah lebih mementingkan perusahaan ketimbang rakyatnya sendiri. Kasus seperti itu terlihat pada petani di Kulon Progo dan Parangkusumo. Tindakan kami tidak mengancam secara fisik. Kami melakukan aksi damai, bukan angkat senjata. Yang harus dicermati adalah isu yang kami bawa: kebebasan bagi rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri. Kami menuntut solusi negara Indonesia yang mengaku demokratis ini untuk berbagai problem di Papua.”

Pada akhirnya, tulisan ini menemukan bahwa pokok pergerakan Aliansi Mahasiswa Papua di Yogyakarta menegaskan upaya massif untuk memperjuangkan Hak Asasi Manusia yang selama ini telah dilanggar oleh negara akibat dari adanya sistem Kapitalisme, Imperialisme dan Militerisme yang merampas hak hidup orang Papua. Aliansi Mahasiswa Papua kemudian melakukan pergerakan perjuangan secara kolektif dengan berafiliasi dengan organisasi massa lainnya dalam wadah pro-demokrasi dan tidak lagi bersifat primodialisme seperti yang dikemukakan oleh Corputty (2007). Mereka juga turut serta menunjukkan kepedulian dengan kaum marginal dalam isu Hak Asasi Manusia di Yogyakarta sehingga menjadikan gerakan mereka semakin kuat dalam perjuangannya.

Fase Pergerakan Sakralitas-Nasionalisme Papua dan Penyemaiannya Kepada Aliansi Mahasiswa Papua

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pergerakan Aliansi Mahasiswa Papua di Yogyakarta bukan dengan tanpa alasan. Namun tersirat pertanyaan lain, sebenarnya Nasionalisme apa yang berakar dalam diri mereka? Nasionalisme Indonesia sebagai bagian dari kesepakatan integrasi, atautkah Nasionalisme yang berbeda dengan warga negara Indonesia lainnya? Mengingat ada dua hal penting, *pertama*, telah cukup lama Papua bergabung dengan Indonesia. *Kedua*, telah banyak yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk Papua melalui berbagai kebijakan afirmatif salah satunya Otonomi Khusus. Demikianlah dalam pembahasan ini akan ditemukan bentuk nasionalisme dalam pergerakan Aliansi Mahasiswa Papua. Untuk itu, kajian pendekatan sejarah Papua, kajian antropologi Papua, dan kajian politik cukup berperan penting dalam menjelaskan terbentuknya Sakralitas-Nasionalisme Papua dan relasinya dengan gerakan Aliansi Mahasiswa Papua.

Konteks sejarah Papua menarasikan hal yang menarik dalam persentuhannya dengan dunia luar, khususnya berkaitan dengan kepercayaan lokal dan kekristenan yang niscaya membangun konsep kehidupan orang Papua. *Cargo cult* atau kargoisme merupakan kepercayaan pribumi yang berkembang di wilayah Melanesia. Narasi dogmatis dalam kepercayaan ini, menyakralkan seorang sosok yang dipercayai akan membawa kebahagiaan dan kedamaian (*messianistic*) (Sterlan dan Godschalk 1989) yang dalam relasinya memiliki keterkaitan dengan sakralitas-nasionalisme Papua (Hutubessy, 2016). Beberapa penelitian sebelumnya salah satunya menurut Benny Giay dalam (Suryawan 2017) menyoroti pertentangan antara kepercayaan lokal dan Kekristenan. Menurutnya, dogma

kekristenan cukup memengaruhi subjektifitas berpikir komunitas Kristen di Papua bahwa, “kegelapan” berasal dari kepercayaan pribumi dan Kekristenan telah datang membawa “terang” menuju peradaban. Dampaknya menurut Giay (Suryawan 2017), tidak sedikit komunitas-komunitas kepercayaan lokal yang dipenjarakan, dibakar rumahnya secara manusiawi dan mengalami kekerasan simbolik yang mengancam psikologi mereka.

Penulis memiliki pandangan yang berbeda dengan konsep yang ditawarkan sebelumnya. Penulis memandang terdapat bagian yang terlupakan dari proses persentuhan antara kepercayaan lokal dengan Kekristenan. Penulis dalam penelitiannya menemukan tiga fase Sakralitas-Nasionalisme yang berkorelasi dengan pergerakan Aliansi Mahasiswa Papua. *Pertama*, Fase hibriditas antara kepercayaan lokal dan Kekristenan. Fase ini merupakan fondasi awal terbentuknya sakralitas-Nasionalisme Papua. Bertemunya ruang hibrid antara kedua entitas ini tidak terlepas dari peran Izaak Samuel Kijne. Meskipun dalam kajian yang dikembangkan oleh Meteray (2012) dan Singh (2008), menemukan bahwa bukan hanya Izaak Samuel Kijne, namun peran dari Jan Pieter Karl Van Eechoud juga telah membentuk semangat nasionalisme orang Papua. Namun, penulis memandang terdapat perbedaan yang mendasar dari proporsi kerja mereka yang tentunya cukup berpengaruh kepada dominannya pola penyemaian Nasionalisme.

Menurut penulis, dibandingkan Van Eechoud, Kijne lebih dominan memberikan sentuhan Nasionalisme. Kijne membangun basis rasa bersama yang cukup kuat melalui sekolah peradaban. Hutubessy (2013) menemukan bahwa Kijne melakukan hibriditas terhadap kepercayaan lokal dan kekristenan serta menghasilkan tiga entitas nilai yakni, injil, pendidikan dan peradaban. Konsep Injil yang merupakan produk dari kolonialisme, memberikan ruang kepada pendidikan berbasis kultural dalam konteks Papua. Model pendidikan yang dikembangkan oleh Kijne diberi nama sekolah peradaban yang merupakan wadah bertemunya seluruh orang Papua dari segala wilayah secara kolektif dan membangun media pembelajaran lokal (Wanma, 2016) yang memiliki kesakralan seperti konteks legitimasi peradaban untuk memimpin dirinya sendiri. Ia memanfaatkan hasil alam sebagai konsumsi bersama dan mengajarkan pola hidup yang menawarkan keteraturan (Onim 2004). Hasil dari didikan dalam sekolah peradaban kemudian memiliki kualitas dan kuantitas yang nantinya menghidupi nilai kesakralan dalam konteks lokal dalam cita-cita membentuk sebuah negara merdeka di tahun 1961. Konsep hibriditas pada fase ini bersifat mutualistik dan telah membentuk memori kolektif yang dalam perkembangannya menurut (Hutubessy 2013), merupakan fase awal dari pembentukan spirit pembebasan yang oleh Kijne menyamakan Sakralitas-Nasionalisme Papua.

Fase *kedua*, merupakan masa transisi. Mengapa demikian? Menurut penulis, ini merupakan bagian gerakan didikan Kijne dan Van Eechoud dari ruang teoritis ke dalam ruang praksis. Memori kolektif dari penghayatan mitologi pribumi dihidupkan dalam manifesto politik oleh kelompok *Nieuw Guinea Raad* untuk membentuk sebuah negara *Nederlands Nieuw Guinea* di Tahun 1961. Kelompok *Nieuw Guinea Raad* yang sebagian besar hasil didikan Kijne merancang Bendera Bintang Kejora, simbol burung mambruk, dan lagu Hai, Tanahku Papua sebagai lagu kebangsaan (Suryawan 2013). Manifesto politik di tahun 1961 menurut Hutubessy (2016) memiliki nilai kesakralan. Simbol bintang di dalam bendera bintang kejora diadopsi dari mitologi *Manarmakeri* (Sharp dan Kaisepo 1994; Kamma 1972) yang merupakan entitas tradisi dari kultus *cargo cult* masyarakat Biak yang dimaknai sebagai sumber kehidupan yang menghasilkan kedamaian (*koror*).

Selanjutnya, entitas burung mambruk sebagai lambang negara juga memiliki filosofi keteraturan. Hal ini ditemukan dalam cara mambruk untuk bertahan hidup secara teratur. Oleh karenanya, nilai ini yang diharapkan oleh *Nieuw Guinea Raad* kepada orang Papua sebagai bagian dari imajinasi sebagai sebuah negara merdeka. Pada bagian akhir, lagu Hai Tanahku Papua yang digunakan sebagai lagu kebangsaan merupakan lagu karangan Izaak Samuel Kijne. Nilai dari syair lagu ini memiliki filosofi untuk mengajarkan orang Papua agar mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena alam yang berlimpah, dan juga memohon tuntunan Tuhan untuk menuntun dan mengajarkan orang Papua untuk selalu rajin dalam menyampaikan maksud Tuhan. Lagu ini terdapat pada buku nyanyian seruling emas nomor dua. Pada tradisinya, nyanyian ini biasanya dikumandangkan sebagai ritus peribadatan di Gereja (Hutubessy 2016). Pola nasionalisme dalam fase transisi juga menggunakan metode

hibriditas kepercayaan, seperti pola pada fase pertama. Manifesto politik yang di dalamnya terdapat ketiga makna yang berbeda, dipersatukan ke dalam sebuah ruang manifesto politik sebagai upaya melegalkan tujuan bersama. Ruang manifesto politik disebut penulis sebagai ruang nasionalisme yang sakral. Oleh karena proses pembentukannya tetap menggunakan pola yang lama dan tanpa meninggalkan nilai Sakralitas-Nasionalisme pada fase pertama. Secara nyata, fase transisi tidak beralih bentuk, namun justru semakin kuat.

Fase *ketiga* merupakan fase pergerakan Sakralitas-Nasionalisme Papua. Fase ini berkembang setelah hancurnya impian untuk mendirikan sebuah negara merdeka pasca-1 Desember 1961 (Osborne 2001; Suryawan 2013), dan bergerak hingga kini (Hutubessy, 2016). Aktivitas pergerakannya selalu bersifat ekspresif dan masif dengan menggunakan atribut bendera bintang kejora sebagai simbol perlawanan dan penegasan identitas nasionalismenya yang juga dapat ditemukan pada tabel 1 di atas. Penulis menemukan dua faktor yang mendorong pergerakan yakni faktor gagalnya mendirikan sebuah negara dan faktor kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia sebelum dan sesudah integrasi dengan Indonesia (Hutubessy 2018).

Pergerakan fase ini telah melakukan presentasi transformatif simbol dalam mempertegas rasa berbeda sebagai bentuk perlawanan. Pola transformasi disebabkan oleh represifitas dari pelarangan penggunaan bendera bintang kejora oleh pemerintah yang dianggap sebagai upaya melawan negara. Padahal, mereka memaknainya sebagai sebuah entitas yang memiliki kesakralan dalam konteksnya. Bendera bintang kejora yang semula dilarang penggunaannya telah bertransformasi dalam muatan fashionabel yang dapat ditemukan dalam baju, topi, tas *noken*, atribut tarian, dan lain sebagainya dengan motif bendera bintang kejora (Hutubessy 2016). *Style fashionable* bendera bintang kejora di ruang publik merupakan fenomena yang menegaskan eksistensi pergerakan Sakralitas-Nasionalisme Papua. Apabila merujuk Gambar 1, tampak moment aksi oleh Aliansi Mahasiswa Papua masih menggunakan bendera bintang kejora yang sebagiannya merujuk nilai *fashion resistance*. Hal ini kemudian menjadi bukti bahwa Sakralitas-Nasionalisme telah menyamai kepada Aliansi Mahasiswa Papua.



Gambar 1
Aksi Aliansi Mahasiswa Papua di Yogyakarta
menggunakan atribut bendera Bintang Kejora (sumber: Suara Kolaitaga)

Sementara itu, kajian sebelumnya oleh Pamuji (2018) yang menemukan bahwa kesadaran nasionalisme dalam pergerakan Aliansi Mahasiswa Papua tersemayam sejak mahasiswa Papua bergabung dengan komunitas ini belum sepenuhnya diterima sebagai sebuah membenaran. Faktanya, tersemayamnya nasionalisme Papua telah sejak lama berkembang melalui ketiga fase ini. Selanjutnya, faktor yang menjadi stimulus penyemaian dalam ketiga fase ini ialah keluarga yang merupakan pusat pembentukan karakter. Menurut Mofu (2019), sedari kecil dalam komunitasnya, ia telah terbentuk oleh keluarga dalam tradisi oral tentang nilai kepapuan dan bukan keindonesian sehingga perasaan berbeda cukup kuat dalam dirinya. Doktrin yang sama juga ditemukan dan diceritakan oleh sebagian teman-temannya dalam komunitas Aliansi Mahasiswa Papua. Faktor ini menurut penulis disebabkan pula

oleh ingatan penderitaan tentang kekerasan struktural, kekerasan cultural dan kekerasan fisik di masa lalu yang mengakibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia selama ini bagi orang Papua.

Sadar akan kehilangan hak asasi dan ruang demokrasi yang dibatasi, menyebabkan mereka bergerak dalam pokok perjuangannya. Corputty (2007) dalam penelitian sebelumnya menemukan bahwa pola perjuangan lama yang bersifat primordialisme mengakibatkan keterpecahan dalam komunitas tidak ditemukan dalam penelitian ini. Pada kenyataannya, pergerakan mereka semakin massif dan telah melakukan koalisi dan kepedulian bersama dengan komunitas lainnya dalam wadah pro-demokrasi. Mereka semakin menghidupkan Sakralitas-Nasionalisme dalam pokok perjuangannya. Sejatinya, Sakralitas-Nasionalisme (Hutubessy 2018) merupakan paham yang terbentuk melalui cara dan rasa yang mendalam terhadap identitas yang berkembang dan dikembangkan dalam konteks mitologi, sejarah, agama, gaya hidup, pengalaman baik dan buruk yang menggerakkan individu dan kelompok masyarakat dalam memperjuangkan sesuatu yang dianggap benar untuk dilakukan dalam kehidupan orang Papua, khususnya oleh Aliansi Mahasiswa Papua di Yogyakarta.

SIMPULAN

Pokok pergerakan Aliansi Mahasiswa Papua memiliki hubungan sejarah perjalanan panjang pada ketiga fase perkembangan Nasionalisme ini. Faktornya berkaitan dengan ingatan kolektif terhadap gagalnya membentuk sebuah negara dan berbagai fenomena kekerasan menjadikan rasa berbeda dengan Indonesia semakin kuat. Ideologi ini kemudian tersemayam melalui keluarga sebagai *locus* pembentukan karakter awal. Analogi sederhananya, anak-anak Papua lebih mempercayai kakeknya di rumah, dari pada guru di sekolah. Meskipun di dalam sistem pendidikan guru lebih dominan mengajarkan Nasionalisme Indonesia di sekolah, namun pengajaran Sakralitas-Nasionalisme dalam keluarga lebih kuat diajarkan.

Melalui doktrinasi musuh bersama, secara sadar telah membentuk dengan sistematis rasa berbeda dengan Indonesia. Pada akhirnya konsep “ke-kita-an” melalui terminologi “kawan” dan “lawan” menjadi semakin kuat pula. Hal ini merupakan salah satu faktor kekalahan dan kegagalan negara dalam meyakinkan orang Papua untuk berbangsa dan bernegara. Sehingga, mengakibatkan pola pergerakan semakin massif melalui isu pelanggaran Hak Asasi Manusia dan pembungkaman ruang demokrasi yang selama ini belum terselesaikan dalam kehidupan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Arendt, H. 1962. *The Origins of Totalitarianism*. Ohio: A Meredian Book.

Awom, P. H. 2012. "Izaak Samuel Kijne dan Pelayanannya di Papua" (F. K. Hutubessy, interviewer), 16 Agustus.

Bahari, Y. 2010. "Karl Marx: Sekelumit tentang Hidup dan Pemikirannya." *Jurnal Pemikiran Sosiologi dan Humaniora* 1 (1):6-7.

Corputty, R. Y. 2007. "Gerakan Mahasiswa Papua : Studi organisasi Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Yogyakarta." Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Creswell, J. W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mix Method*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Djopari, J. R. 1993. *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*. Jakarta: Grasindo.

Douw, A. 2018. "Sejarah Aksi Mahasiswa." (F. K. Hutubessy, interviewer), 8 September.

- Droglever, P. J. 2010. *Tindakan Pilihan Bebas! Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri*. Yogyakarta: Kanisius.
- Giay, Benny dan Yafet Kambai. 2003. *Yosepha Alomang ; Pergulatan Seorang Perempuan Papua Melawan Penindasan*. Jayapura: Elsham Pappus.
- Griapon, S. 2018. "Kebutuhan Demokrasi." (F. K. Hutubessy, Interviewer), 8 September.
- . 2018. "Stigma dan Sterotipe." (F. K. Hutubessy, Interviewer), 7 September.
- Hardiman, F. B. 2011. *Hak-Hak Asasi Manusia: Polemik dengan Agama dan Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hiariej, E. 2010. "Aksi dan Identitas Kolektif Gerakan Islam Radikal di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 14 (2):135.
- Hutubessy, F. K. 2013. *Memimpin Diri Sendiri*. Salatiga: UKSW.
- . 2014. "Panggilan untuk Membangun Solidaritas Kebangsaan dari Tanah Papua." *Pax Humana*:23.
- . 2016. *Nasionalisme Eksternal dan Internal Papua*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- . 2018. "Menguatnya Sakralitas Nasionalisme Papua dalam Fenomena Kekerasan." *Sintesa Journal*:128.
- Kamma, F. 1972. *Messianic Movements in The Biak-Numfor Area*. The Hague, Martinus Nijhoff.
- Kusumadewi, A. 2016. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160809081824-20-150076/aliansi-mahasiswa-papua-gerakan-yang-kian-garang>
- Locke, J. 1959. *An Essay Concerning Human Understanding*, collected and annotated by Alexander Campbell Fraser. New York: Dover Publications.
- Meteray, B. 2012. *Nasionalisme Ganda Orang Papua*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Mofu, F. 2019. "Gerakan Prodemokrasi." (F. K. Hutubessy, Interviewer), 1 Januari.
- Sharp, Nonie dan Markus Wonggor Kaisiepo. 1994. *The Morning Star in Papua Barat*. North Carlton: Arena Publications.
- Onim, J. 2004. *87 Tahun Sejarah Pendidikan Teologi di Tanah Papua*. Jayapura: GMT.
- Osborne, R. 2001. *Kibaran Sampari, Gerakan Pembebasan OPM, dan Perang Rahasia di Papua Barat*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi masyarakat (ELSAM).

- Pamuji, R. 2018. "Nasionalisme Papua dalam Organisasi Aliansi Mahasiswa Papua." Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Rahab, A. A. 2006. "Operasi-operasi Militer di Papua: Pagar Makan Tanaman?" *Jurnal Penelitian Politik LIPI* 3.
- Senis, Y. 2013. "Globalisasi dan Kemiskinan di Papua dalam Perspektif Gramsci." *Dinamika Sosial* 45.
- Singh, B. 2008. *Papua Geopolitics and the Quest for Nationhood*. New Jersey and London: Transaction Publisher.
- Sitepu, M. 2017. *BBC News Indonesia*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39031020>, 21 Februari.
- Sterlan, J. G. dan J. A. Godschalk. 1989. *Kargoisme di Melanesia*. Jayapura: Pusat Studi Irian Jaya.
- Suabey, R. S. 2017. "Analisis Fungsi dan Mitos Kuri dan Pasai Bagi Masyarakat Asli Teluk Wondama." *MELANESIA: Jurnal Ilmiah Kajian Bahasa dan Sastra* 01(02):77-78.
- Suryawan, I. N. 2013. *Jiwa yang Patah*. Yogyakarta: Kepel Press .
- Suryawan, I. N. 2017. Lahirnya Zaman Bahagia: Transformasi Teologi Pribumi di Tanah Papua. *Jurnal Sosiologi Walisongo* 123.
- Tilly, C. 1986. *The Contentious French*. Cambridge: Harvard University Press.
- Wanma, H. 2011. *Cahaya yang Pudar di Bukit Peradaban Tanah Nieuw Guinea*. Jayapura: Andy Wijaya.
- Wanma, H. 2016. *Dominee Izaak Samuel Kijne: Mengenang Hidup dan Karyanya untuk Tanah dan Bangsa Papua (Mansinam 23 Juni 1923-Miei, Medio September 1958)*. Yogyakarta: JW Press.
- Widjojo, M. S. 2009. *Papua Road Map: "Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future"*. Jakarta: Kerja Sama LIPI, Yayasan Tifa, dan Yayasan Obor.
- Winandi, W. 2009. Reformasi dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi. Dalam *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, disunting oleh Muladi. Bandung: Refika Aditama.
- Wonda, S. 2007. *Tenggelamnya Rumpun Melanesia: Pertarungan Politik NKRI di Papua Barat*. Jayapura: Deiyai.
- Yoman, S. S. 2007. *Pemusnahan Etnis Melanesia*. Jayapura: Cenderawasih Press.